

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Transjakarta Kaji Kenaikan Tarif

Tarif Transjakarta belum pernah dinaikkan sejak masa pemerintahan Gubernur Sutiyoso.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo akan mengkaji kenaikan tarif Transjakarta pada tahun ini. Sebab, ongkos bus kota sebesar Rp 3.500 dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini. Jika tarif itu dipertahankan, sektor yang terbebani adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

Menurut Jhony, berdasarkan kajian dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 2010, kelayakan tarif Transjakarta adalah sekitar Rp 5.000. "Itu berdasarkan *ability to pay* dan *willingness to pay*," ujarnya kepada *Tempo* di Jakarta Selatan, Kamis lalu.

Wacana kenaikan tarif Transjakarta sebenarnya sudah muncul sejak 2010. Saat itu, untuk merespons kenaikan harga bahan bakar gas, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berencana menaikkan tarif Transjakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.500. Namun rencana itu tak pernah direalisasikan.

Pada tahun yang sama, YLKI menggelar survei terhadap 3.000 responden pengguna Transjakarta di semua koridor. Hasilnya, 62,30 persen responden menyatakan ongkos ideal bus kota itu ialah Rp 3.500. Namun kemampuan membayar atau *ability to pay* para pengguna Transjakarta ialah sekitar Rp 4.800.

Jhony menuturkan banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam mengkaji kenaikan tarif Transjakarta, misalnya bisnis perusahaan, beban terhadap anggaran daerah, dan aspek yang berhubungan dengan operator.

Dalam situs Apbd.jakarta.go.id disebutkan bahwa tahun ini anggaran *public service obligation* (PSO) atau subsidi untuk PT Transjakarta mencapai Rp 3,2 triliun. Setahun sebelumnya, dana subsidi sebesar Rp 2,7 triliun. Adapun 90 persen biaya operasional Transjakarta bersumber dari subsidi dan sisanya dari penjualan karcis.

Jhony mencontohkan, di beberapa negara, seperti Singapura, Australia, dan Amerika Serikat, ongkos angkutan umum sebesar US\$ 1,5-4. Karena itu, Jhony tidak khawatir penumpang akan

meninggalkan Transjakarta jika tarifnya dinaikkan. "Apa pun keputusannya, dikasih (tarif) Rp 5.000 kan juga merupakan keunggulan," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo belum memberikan pernyataan atas kajian kenaikan tarif yang akan dilakukan oleh Transjakarta. Pertanyaan *Tempo* tak kunjung dibalas hingga tenggat tulisan ini.

Anggota Komisi Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, S. Andyka, mengatakan awalnya Transjakarta dibangun untuk mendorong orang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi publik. "Jadi mulanya, Transjakarta dibangun bukan untuk *profit oriented*," tuturnya.

Masalahnya, Andyka melanjutkan, semakin bertambahnya jumlah penumpang angkutan umum—seperti Transjakarta, MRT, dan LRT—subsidi yang ditanggung oleh pemerintah DKI juga bertambah besar. Apalagi manajemen perusahaan daerah di bidang transportasi ini belum bisa memberikan kepastian kapan bisa mandiri agar tidak lagi mengandalkan subsidi.

Andyka menilai, jika tarif Transjakarta dinaikkan menjadi Rp 5.000, ini masih sesuai dengan kemampuan masyarakat. Namun ia meminta agar perusahaan daerah itu mengkaji berbagai aspek, seperti dampak sosial dan ekonomi, jika ada kenaikan ongkos Transjakarta.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, membenarkan bahwa pihaknya pernah membuat survei perihal *ability to pay* pengguna Transjakarta pada 2010. Ia tidak mempermasalahkan jika saat ini Transjakarta berencana mengkaji kenaikan tarif bus kota tersebut. "Sejak era Bang Yos (Gubernur Sutiyoso), 2004, tarif Transjakarta Rp 3.500," tuturnya.

● GANGSAR PARIKESIT

Transjakarta dibangun bukan untuk *profit oriented*."

S. Andyka

Anggota Komisi Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta